



PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENYONGSONG NEW NORMAL

Afrizza Wahyu*, Endang Larasati, Tri Yuniningsih
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Sudarto No.13, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Submitted: 4th Jan 2021

Revised: 5th Jan 2021

Accepted: 11th Nov 2021

Abstract *The tourism sector has become one of the sectors that has stopped operating due to the global pandemic (Corona Virus 2019 / Covid-19). Tourism activities in various parts of the world are estimated to have fallen by up to 90% (mediaindonesia. Accessed on 20/11/2020). The losses incurred in the tourism sector were up to US \$ 9 billion or equivalent to Rp135 trillion. The government has issued a new system of order called the new normal, the tourism sector must be re-developed and become a strategic plan after COVID-19. The government policies examined in this article are in order to see the policies taken to rebuild the tourism sector in welcoming a new normal era. The method used is descriptive literature, by examining various phenomena, challenges and potentials with relevant references. The results of a descriptive literature study of government policies taken in developing the tourism sector are: (I) government policies in front of social safety nets (safety, security, health) in opening the tourism sector. (ii) In developing the tourism sector, there are three aspects that must be in place, namely Maintenance (the ability to maintain the existence of a destination), Self Esteem (inviting the community to be involved in tourism organizations) and Freedom from servitude (presenting local government in tourism organizations). (iii) The form of government policy in developing the tourism sector by encouraging tourism in the city, or tourism in the city.*

Keywords: Government Policy, Tourism Sector, COVID-19

Abstrak Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang berhenti beroperasi karena pandemic global (Corona Virus 2019 / Covid-19). Aktivitas wisata di berbagai belahan dunia pun diperkirakan anjlok sampai 90% (mediaindonesia. Diakses pada tanggal 20/11/2020). Kerugian yang ditimbulkan pada sektor pariwisata indonesia hingga US\$9 miliar atau setara Rp135 triliun. Pemerintah telah mengeluarkan sistem tatanan baru yang disebut sebagai new normal, agar sektor pariwisata harus kembali dikembangkan dan menjadi rencana strategis pasca covid-19. Kebijakan pemerintah dikaji dalam artikel ini guna mengetahui kebijakan yang diambil guna membangun kembali sektor pariwisata dalam menyongsong era new normal. Metode yang digunakan adalah kepustakaan deskriptif, yaitu dengan menelaah berbagai fenomena, tantangan dan potensi dengan merujuk referensi yang relevan. Hasil

kajian kepustakaan deskriptif terhadap kebijakan pemerintah yang diambil dalam mengembangkan sektor pariwisata yaitu: (I) kebijakan pemerintah mengedepan *social safety net* (*safety, security, healthy*) dalam pembukaan sektor pariwisata. (ii) kebijakan dalam membangun sektor pariwisata ada tiga aspek yang harus ada, yaitu *Sustenance* (kemampuan untuk mempertahankan eksistabilitas dari destinasi), *Self Esteem* (mengajak masyarakat terlibat dalam mengelola pariwisata.) dan *Freedom from servitude* (pemberian kebebasan daerah dalam mengelola pariwisata). (iii) Bentuk kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sektor wisata dengan cara mendorong wisata *in city*, atau wisata dalam kota.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemerintah, Pengembangan Sektor Pariwisata, COVID-19*

PENDAHULUAN

Proses dalam pembuatan kebijakan publik yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak terlepas dari peran-peran masing-masing aktor pemangku atau *stakeholders* yang terlibat. Berbagai tahapan yang harus dijalankan dalam proses pembuatan kebijakan publik, salah satunya yaitu implementasi kebijakan yang menjadi tahapan krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan menurut Budi Winarno (2012: 147) memiliki konsep yang dipahami sebagai tahap dalam proses kebijakan publik yang dilakukan dan tidak terlepas dari proses sebelumnya yaitu formulasi kebijakan di mana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan, program kebijakan serta upaya penyelesaian masalah publik. Implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan sebuah keputusan dan tindakan-tindakan yang dijalankan secara sistematis untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Implementasi kebijakan publik juga dilihat dari segi proses yang mencakup segala tindakan sesuai dengan keputusan yang diambil. Masalah dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan permasalahan sosial yang berdampak pada kalangan masyarakat tertentu, akan tetapi juga berkaitan dengan permasalahan bencana yang perlu tindakan sigab dalam penanganannya (Ariyanti, 2015: 24).

Kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu,

penting juga untuk memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan kepada masyarakat yang dilayaninya. Dengan pemahaman yang seperti itu dapat memastikan pembuatan kebijakan publik yang mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi yang terkait, pada akhirnya sebuah kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara memadai. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kekayaan wisata. Mulai dari wisata bahari, wisata puncak, wisata kuliner, wisata candi, wisata suku dan budaya sampai kepada wisata Islam atau sejarah perkembangan islam di Indonesia. Diantara destinasi-destinasi tersebut, proyeksinya adalah untuk meningkatkan perekonomian sekaligus memperkuat citra indonesia di mata internasional. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan antara lain memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Kompleksitas dalam pembangunan dan juga tidak terlepas dari kemauan para pemangku kebijakan untuk menggerakkan sektor pariwisata sebagai salah satu pendapatan daerah yang dapat diandalkan.

Di setiap provinsi memiliki keunggulan daerah yang dapat diandalkan sebagai pendapatan daerah. Dengan adanya kekayaan alam tersebut diperlukan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya sehingga pengelolaan tersebut menjadi terarah dan tidak keluar jalur. Banyak kendala yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata di daerah, namun dari semua itu sumber daya manusia yang sebagai pengelola merupakan faktor kunci dalam pembangunan pariwisata daerah. Kemampuan dari sumber daya manusia yang mengelola pariwisata daerah haruslah memiliki kemampuan yang baik dalam keilmuan sehingga dapat menerapkannya pada saat bekerja nanti. Kesalahan dalam mengelola potensi menjadi objek wisata akan berakibat buruk di masa mendatang dalam Berkaitan dengan upaya mengatasi *Covid-19* di Indonesia, regulasi-regulasi yang dibuat oleh para menteri mengenai pembatasan sosial berskala besar menjadi salah satu strategi pemerintah Indonesia untun mengurangi penyebaran coronavirus yang semakin tinggi. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam meredam *Covid-19* dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2020 dan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 yang diarahkan untuk mempercepat penanganan Coronavirus. Instruksi Presiden meliputi: *Pertama*,

adanya realokasi anggaran yang dari Kementerian/Lembaga *refocussing* kegiatan. Kedua, insentif tenaga kesehatan (di wilayah darurat corona) serta pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. *Ketiga*, melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus yang dialihkan dari Kementerian/Lembaga ke Gugus Tugas *Covid-19*.

Kegiatan pariwisata memang banyak terkait dengan alam, sehingga erat kaitannya dengan masalah lingkungan. Oleh sebab itu, syarat untuk tetap atau meningkatkan pengembangan sektor wisata adalah dengan melibatkan masyarakat sepenuhnya. Partisipasi masyarakat lokal sangat dibutuhkan untuk menjaga ketahanan destinasi. Hal ini karena kepariwisataan adalah sektor yang berbasis jangka Panjang. Sektor wisata juga telah memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi global, dan industri pariwisata telah menjadi industri penting bagi banyak negara untuk berupaya mengembangkannya (Hsieh & Kung, 2013). Karena dapat menghasilkan devisa dan sekaligus diharapkan akan memperluas kesempatan kerja dan menciptakan kesempatan kerja dan menciptakan usaha bagi masyarakat. Selain itu, sektor pariwisata juga akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat setempat (Eshlikii & Kaboud, 2012)

Namun, akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020 adalah waktu dimana sektor pariwisata berhenti beroperasi disebabkan pandemic global (*Corona Virus 2019 / Covid-19*). Awal munculnya virus tersebut sejak Bulan November 2019 dan Penetapan Wabah Pneumonia atau Covid 19 sebagai pandemic global pada Bulan Desember 2019 (Chen et al, 2020:1). Kondisi ini menyebabkan seluruh aspek kehidupan terganggu. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang babak belur dihantam virus Corona. Sederet pembatasan perjalanan membuat orang tak bisa berlibur, alhasil industri pariwisata tak bisa bergerak.

Data Organisasi Pariwisata Dunia memprediksi bahwa dalam penurunan aktivitas wisatawan internasional tahun ini lebih dari 30%. Aktivitas wisata di berbagai belahan dunia pun diperkirakan anjlok sampai 90% (mediaindonesia. Diakses pada tanggal 20/11/2020). Demi menghindari paparan covid-19, berbagai atraksi wisata mulai dari museum, taman hiburan, taman-taman rekreasi, dan berbagai pusat hiburan pun ditutup. Kecenderungan yang sama juga berlangsung di Indonesia. Bali, sebagai destinasi utama Indonesia, mengacu data Gabungan Industri Pariwisata

Indonesia Februari hingga April lalu, menderita potensi kerugian hingga US\$9 miliar atau setara Rp135 triliun (mediaindonesia. Diakses pada tanggal 20/06/2020). Hal itu terjadi akibat wisatawan Tiongkok dan Australia yang menjadi pasar terbesar menghentikan aktivitas ke Pulau Dewata.

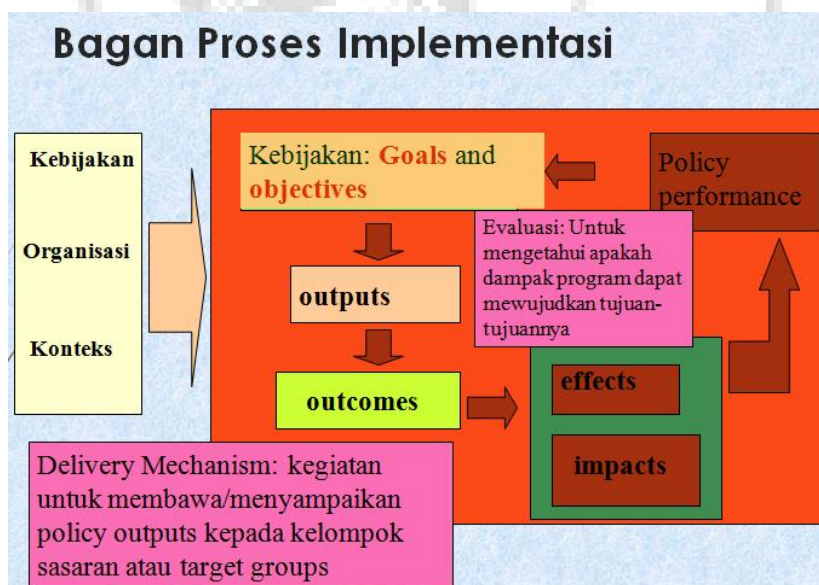
Tentu ini menjadi tugas besar bagi Pemerintah Indonesia untuk melihat peluang dan ancaman yang akan menghantam sektor pariwisata pasca covid-19. Pada akhirnya pemerintah telah mengeluarkan sistem tatanan baru yang disebut sebagai *new normal*. melalui *new normal* ini, sektor pariwisata harus kembali dikembangkan dan menjadi rencana strategis pasca covid-19. kemudian, pada awal juni 2020, Pemerintah Indonesia sudah merancang kondisi *new normal* alias normal yang baru. Beberapa sektor pun sudah mulai dibuka dengan sederet protokol kesehatan ketat tentunya. Lalu bagaimana sektor pariwisata? apakah sektor pariwisata dapat dibuka, karena sektor ini lebih berpotensi terhadap penyebaran virus corona. Berdasarkan hal itu, tentu banyak faktor yang mempengaruhi beroperasinya Kembali pariwisata di Indonesia dalam tatanan *new normal*. Salah satunya adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, pada artikel ini akan mengulas bagaimana pemerintah dalam membangun kembali sektor pariwisata dalam menyongsong *new normal*.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan deskriptif, yaitu mengumpulkan data, informasi, dengan menelaah jurnal-jurnal penelitian, buku-buku, literatur-literatur serta sumber sumber terpercaya baik tulisan maupun digital yang berhubungan dan relevan dengan tulisan ini (Creswell, 2009). Analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah kondensasi. kondensasi berupa pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan (transformasi data), penyajian data serta penarikan kesimpulan secara induktif (Miles et al, 2014). Tulisan ini akan menelaah berbagai fenomena, tantangan dan potensi yang akan diberikan jika menganut paham ekologi politik. Kemudian penulis juga berusaha untuk menggali pembelajaran dari referensi yang ada guna mencari alternatif dalam menghasilkan produk kebijakan yang berkualitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 membuat banyak orang mengalami kejenuhan di tengah penerapan pembatasan sosial. kejenuhan tersebut karena sempitnya gerak dan aktivitas setiap individu. Pada prinsipnya pembatasan tersebut adalah untuk kemanfaatan masyarakat. Namun, di sisi lain ada sektor yang terancam akibat pembatasan tersebut. Sebut saja sector pariwisata, dimana Indonesia merupakan negara yang mengedepankan sektor pariwisata sebagai salah satu pendapatan prioritas. Banyak aspek yang mengelilingi sektor pariwisata tersebut. Seperti transportasi, UMKM, Perhotelan dan sebagainya. Coronavirus atau Covid-19 ditetapkan sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Hal itu berdasarkan pertimbangan penyebaran Coronavirus yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan jumlah kematian yang meningkat dan meluas. Jika kita kaitkan dengan proses administrasi dalam disiplin ilmunya, proses implementasi melalui beberapa tahapan yang dituangkan ke dalam skema berikut ini :



Pada bagan ini jelas terlihat bahwa suatu kebijakan diambil atau ditetapkan setelah adanya isu yang dimobilisasikan dalam hal ini adalah penyebaran wabah COVID-19. Kebijakan yang diambil saat ini adalah New Normal dalam bidang pariwisata). *Goals* kebijakan ini adalah menghindari adanya penyebaran yang semakin luas dari wabah COVID-19. Langkah ini

bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit, seperti diatur dalam pasal 59 ayat 2, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Seperti diatur dalam pasal 59 ayat 3, pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Sedangkan, kriteria dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Objeknya adalah seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan. Dalam proses implementasi, terdapat *output* dan *outcome*, yang berarti dalam proses kebijakan terdapat hasil berupa produk (*output*) dan hasil dari akibat (*outcomes*). Maka dari itu *output* yang merupakan hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh para implementor dalam kurun waktu tertentu. *Output* dari kebijakan ini adalah penerapan *social distancing* sebagaimana harapannya dengan mengurangi interaksi dalam masyarakat sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. *Outcome* yang merupakan hasil dari akibat pelaksanaan produk kebijakan ternyata dalam kebijakan PSBB ini, tidak terlalu menunjukkan hasil seperti yang diinginkan memunculkan sebuah kebijakan Kebijakan Publik Riant Nugroho dalam bukunya “Public Policy” memberikan definisi tentang kebijakan publik menurut beberapa ahli sebagai berikut (Riant Nugroho 2018): a) Harald Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). b) David Easton (1965, 212) mendefinisikan kebijakan publik merupakan akibat dari sebuah aktivitas pemerintahan (*the impact of government activity*). c) Carl I. Friedrich (1963, 79) mendefinikan sebagai sebuah rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangkai mencapai tujuan tertentu.

Sehingga dalam bisnis perhotelan, penerbangan, biro perjalanan wisata, dan pengelola tempat wisata kini memilih melakukan penutupan sementara selama wabah corona. Lebih dari 2.000 hotel tutup, juga bandara dan pelabuhan. Total kerugian akibat penghentian operasi bandara dan penerbangan yang berujung kebijakan merumahkan pekerja industri pariwisata. Sektor pariwisata paling terguncang semenjak adanya pandemi Corona. Penerbangan dibatasi bahkan dilarang, banyak maskapai yang merumahkan karyawannya, hotel pun sepi, tempat wisata di tutup dan pendapatan daerah dari wisata menurun drastis. Juga adanya anjuran untuk di rumah saja membuat pariwisata semakin kehilangan arah. Sejak wabah virus corona merebak di seluruh dunia, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia perlahan-lahan anjlok. Secara kumulatif sejak Januari hingga Maret, jumlah wisatawan yang datang hanya mencapai 2,61 juta orang atau turun drastis 30,62 persen; dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu 3,76 juta orang (detik.com. Diakses pada tanggal 20/06/2020).

Jika dibandingkan bulan Februari, maka jumlah kedatangan wisatawan turun 45,50 persen; sementara jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu penurunan tercatat lebih drastis lagi, yaitu 64,11 persen. Kerugian dari sektor pariwisata diprediksi mencapai Rp 60 triliun (detik.com. Diakses pada tanggal 20/11/2020). Kemudian pada awal bulan Juni, pemerintah Indonesia melihat perkembangan dari kondisi covid-19 Indonesia, ternyata sudah lebih baik. Akhirnya secara perlahan, industri pariwisata siap-siap memasuki *new normal* meski masih melawan COVID-19. Berbagai aturan disiapkan untuk mencegah pengunjung, pengelola, dan pihak lain di lokasi wisata terinfeksi virus corona. beberapa syarat yang harus dipatuhi oleh pengunjung, diantaranya adalah surat keterangan sehat dan hasil tes rapid non reaktif.

Selain itu, ada kebijakan lain dalam menghadapi masa new normal. Misalnya Daerah Jawa Barat, tepatnya di Pantai Pangandaran, yang mengeluarkan kebijakan Biaya tes rapid Rp 300 ribu. Kalau sekeluarga 5 orang berwisata, biayanya sudah Rp 1,5 juta. Memang cukup lumayan mahal. Tapi pemerintah setempat mencoba menyiasati dengan memberikan diskon 30 persen untuk hotel dan 5 persen untuk restoran, Kebijakan tersebut sangat mungkin mempengaruhi jumlah pengunjung. Namun harus dilakukan untuk mengantisipasi infeksi virus corona. Kebijakan lain adalah menggeser lokasi *check point* ke lokasi dengan areal parkir lebih luas untuk mencegah antrian.

Jika Pantai Pangandaran telah siap memasuki *new normal*, mungkin berbeda dengan tempat wisata lainnya. Kapan *new normal* diberlakukan bergantung pada kondisi tiap daerah yang berbeda. Berbeda dengan sikap pemerintah pusat dalam menyongsong sektor pariwisata dalam era *new normal*. Pemerintah pusat menginstruksikan tatanan *new normal* di sektor pariwisata sebagai berikut:

Perubahan Tren, kapan *new normal* diberlakukan mungkin saja terjadi tak lama lagi dalam sektor pariwisata. Dengan pertimbangan tersebut, tren wisata berubah menjadi lebih mengutamakan *health, hygiene, safety*, dan *security*. Selain itu preferensi liburan akan bergeser ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti *solo travel tour, wellness tour*, termasuk juga di dalamnya *virtual tourism* serta *staycation*. Pemerintah pusat meminta jajarannya melakukan inovasi dan perbaikan di sektor pariwisata. Protokol *new normal* yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan harus siap saat menyambut wisatawan.

Jangan Tergesa-Gesa, Keinginan mengaktifkan kembali sektor pariwisata dan secepatnya menjawab kapan *New Normal* diberlakukan, ketentuan waktu ini harus segera diambil oleh pemerintah, karena berisiko yang menyebabkan pelaku industri tergesa-gesa. Pemerintah pusat menekankan perlunya pengecekan kondisi di lapangan sebelum membuka kembali destinasi wisata mengenai waktunya kapan, pemerintah menghimbau untuk tidak tergesa-gesa. Tetapi tahapan-tahapannya yang disampaikan di atas harus dilalui dan dikontrol dengan baik setiap level pemerintahan serta saling koordinasi. Pemerintah pusat juga meminta jajarannya mengidentifikasi destinasi wisata dengan potensi penularan virus corona kurang dari satu. Dengan berbagai persiapan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat maka destinasi wisata bisa dibuka secara bertahap.

Jangan Sampai Ada Kasus Impor Covid-19, Poin lain yang diingatkan pemerintah pusat adalah risiko kasus impor corona yang sangat besar. Adanya kasus impor corona dapat merusak citra pariwisata Indonesia sehingga harus diantisipasi dengan cepat dan tepat dalam mempersiapkan sebuah standar baru menjadi sebuah kultur baru, kebiasaan baru di sektor pariwisata. Perlunya sosialisasi yang masif diikuti uji coba, diikuti simulasi-simulasi, dan perlunya dimulai sekarang ini pengawasan agar betul-betul standar protokol kesehatan itu dijalankan di lapangan.

Pemerintah pusat juga meminta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama menyiapkan program promosi pariwisata dalam negeri yang bebas ancaman virus Corona. Pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif juga harus berbenah di segala bidang menghadapi *new normal*. Melihat intruksi pemerintah pusat terhadap tatanan *new normal* terkait pariwisata, maka dapat dipahami bahwa pemerintah pusat memiliki fokus kearah pariwisata. Kefokusan itu dilihat dari perhatian dan pertimbangan yang besar bagi sektor pariwisata. Karena pemerintah mengakui bahwa akan ada resiko besar jika pariwisata dibuka Kembali saat *new normal*, yang mana pandemi covid-19 masih terjadi. Resiko tersebut akan mengakibatkan citra pariwisata akan terpuruk dan akan menyulitkan untuk memperbaikinya. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah melihat *best practices* di negara-negara yang sudah membuka objek wisata. bagaimana negara tersebut mengambil langkah dalam mengoperasikan kembali sektor pariwisata.

Selain itu juga, perlunya sosialisasi yang masif, diikuti uji coba, diikuti simulasi-simulasi dan juga perlunya dimulai sekarang ini pengawasan agar betul-betul standar protokol kesehatan itu dijalankan di lapangan. Meskipun daerah-daerah yang berada di zona hijau, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tidak menutup kemungkinan di era *new normal* sekaligus di wilayah zona hijau, tidak terjadi penyebaran covid-19 atau bahkan mengundang wisatawan asing sehingga terjadinya inpor covid-19. Faktor utama yang harus disoroti adalah protokol *New Normal* harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Karena isu utamanya adalah keselamatan dan kesehatan, Maka protokol tatanan normal baru di sektor pariwisata betul-betul harus menjawab isu utama tadi, Mulai dari protokol kesehatan yang ketat di sisi transportasinya, di sisi hotelnya, di sisi restorannya, dan juga area-area wisata yang dimiliki. Mengacu kepada teori yang digunakan penulis dalam artikel ini, bahwa ada tiga point penting dalam aspek pembangunan. Maka teori ini akan menghubungkan kepada sektor pembangunan pariwisata dalam tatanan *new normal*, yaitu sebagai berikut:

Ketahanan (Sustenance), secara umum Ketahanan ini mengarah kepada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Namun pada konteks pembangunan pariwisata adalah kemampuan untuk mempertahankan eksistabilitas dari destinasi tersebut, sehingga tetap mampu mengundang para wisatawan untuk mengunjungi destinasi tersebut. Oleh sebab itu, sebagai

upaya untuk mempertahankan destinasi dari pandemic ini adalah menjaga ekosistem semaksimal mungkin. kekosongan destinasi tentu memberikan potensi terhadap kesewenang-wenang masyarakat untuk mengotori, merusak destinasi tersebut.

Demikian, kekosongan destinasi juga menggiring masyarakat untuk bermukim. Hal itu karena ingin menghindari dari penyebaran covid-19. Selain menyendiri, di rumah saja, juga jauh dari keramaian, dan model seperti banyak dijumpai di tengah-tengah masyarakat khususnya yang sudah berada di zona merah. Dalam ketahanan atau kemampuan untuk menjaga keutuhan destinasi juga harus diperhatikan dengan baik. Jangan sampai karena untuk mengembangkan destinasi suatu daerah, sehingga mengabaikan instruksi atau protokol dalam tatana *new normal*. Ini adalah langkah yang keliru bagi daerah dalam mengelola wisata. Memang mempertahankan kebutuhan wisata itu sulit, tetapi dalam waktu yang bersamaan, pemerintah daerah juga harus melihat ancaman yang ditimbulkan dalam menjaga keutuhan destinasi tersebut. setidaknya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam tatanan *new normal* ini terkait membuka serta mempertahankan sebuah destinasi wisata. yaitu:

Pertama, Standard Operasional Prosedur. tentu SOP yang akan diterapkan di sektor pariwisata akan disiapkan, berbagai macam bidang. SOP tersebut itu banyak kaitannya ya misalnya di hotel, restoran, dan lain-lain yang akan diterapkan. *Kedua*, Melakukan simulasi untuk menjalankan SOP. usai menjalankan simulasi tersebut, sektor pariwisata memberikan sosialisasi kepada masyarakat. *Ketiga*, Uji coba. penerpan uji coba ini harus didasarkan pada wilayah yang sudah berada di zona hijau.

Harga diri (Self Esteem), Secara umum definis Harga Diri (*Self Esteem*) dalam teori ini adalah untuk tetap memperhatikan kondisi masyarakat lokal dalam pembangunan. Pada konteks pembangunan pariwisata, *self-esteem* ini lebih mengarah kepada melibatkan masyarakat dalam mengelola pariwisata. Selain itu, maksud dari *self-esteem* juga adalah menyesuaikan pariwisata dengan *local wisdom* daerah. Misalnya daerah NTT dan Aceh yang menerapkan model wisata halal. Ini adalah sebuah bentuk kebijakan yang dalam pengelolaan tetap mengedepankannya *local wisdom*. Menjaga *local wisdom* dari serangan covid-19 juga sebuah upaya yang perlu diapresiasi. Terutama pembangunan sektor wisata berbasis *local wisdom*. Ketertarikan wisatawan biasanya karena

local wisdom, sehingga rasa ingin tau wisatawan lebih tinggi daripada destinasi pada umumnya.

Akan tetapi, di samping menjaga *local wisdom* terhadap pembangunan wisata di tatanan *new normal*, pemerintah juga harus aktif dalam mengawasi pergerakan wisatawan melalui data best atau pelaporan di perbatasan setempat. Hal ini disebabkan bukan hanya masyarakat lokal yang berkunjung ke destinasi tersebut. Tetapi negara-negara yang sudah mencabut kebijakan *lockdown* dan sejenisnya juga menjadi subjek terhadap pengunjung destinasi tersebut. Oleh sebab itu, pada *Self Esteem ini harus menekankan prinsip kebersihan, Kesehatan dan keselamatan (Cleanliness, Health, and Safety / CHS)*. Konsep CHS merupakan strategi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar masyarakat nantinya dapat tetap produktif dan aman di tengah pandemi Covid-19

Penerapan dan pengawasan program CHS sebagai tatanan kenormalan baru di destinasi wisata juga dikoordinasikan dengan Gugus Tugas dan Kepala Daerah masing-masing wilayah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk menjaga kestabilan keamanan di area perbatasan dan area kawasan wisata. keamanan tersebut adalah upaya dalam menyongsong tatanan *new normal* yang lebih baik bagi daerah tersebut.

Freedom from Servitude, secara teori, *Freedom from servitude* bermaksud memberikan kebebasan bagi negara, kelompok maupun individu untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan. Partisipasi tersebut bisa dalam bentuk, pikiran, tenaga, legalitas dan sebagainya. Sedangkan pada konsep pembangunan pariwisata, *Freedom from servitude* lebih mengarah kebebasan daerah dalam mengelola aset daerahnya masing-masing. atau lebih dikenal sebagai model desentralisasi. Artinya potensi-potensi wisata setiap daerah, lebih baik diberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata tersebut. Tentu itu akan membantu dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terwujudnya desentralisasi fiskal sekaligus menciptakan masyarakat yang mandiri dan kreatif.

Meskipun setiap daerah diberi kewenangan dan kebebasan dalam mengurus serta mengelola potensi alam. Tapi, pemerintah daerah juga tidak boleh mengabaikan perintah dari pemerintah pusat. Artinya tetap ada koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya. Koordinasi ini sangat

penting dibangun, terutama daerah-daerah yang menjadi lintas ekonomi, lintas wisata dan sebagainya. Melalui koordinasi tersebut dapat terselenggaranya pelayanan publik yang baik dan kemanaan yang terjangkau. Jika koordinasi ini dibangun, maka pembangunan sektor wisata dalam menyongsong *new normal* dapat terlaksana dengan baik. Semua protocol dan intruksi dalam tatanan *new normal* mudah diimplementasikan. Pada akhirnya *Freedom from Servitude* menggambarkan bahwa harus adanya koordinasi di samping kewenangan penuh yang berikan dalam mengelola wisata. Adanya tuntutan untuk saling Kerjasama antar daerah.

Banyak *best practice* sudah membuktikan dengan kerjasama antar daerah mampu menyelesaikan persoalan skala lokal maupun nasional. Misalnya hasil penelitian dari Kimura *et al* (2020) menunjukkan bahwa melalui kerjasama antar daerah telah membantu menanggapi guncangan ekonomi dan guncangan pandemik. Manfaat besar dari kerjasama ini adalah mengurangi tingkat penularan. Penelitian lain dilakukan oleh Kurki *et al* (2016) terkait penyediaan layanan air. Hasilnya menunjukkan bahwa skala ekonomi menjadi lebih jelas, mempengaruhi kepemimpinan dan suasana politik serta norma-norma yang berlaku. Kemudian setelah melihat fenomena yang terjadi terhadap sektor pariwisata, baik dari ancaman, peluang dan dilema pemerintah dalam mengambil keputusan. Kebingungan tersebut tentu membutuhkan waktu yang lama, sedangkan para industri pariwisata terus menuntut supaya sector pariwisata Kembali beroperasi. oleh karena itu, Ada beberapa prediksi terkait sektor pariwisata jika sudah dibuka oleh pemerintah dalam tatanan *new normal*. Prediksi ini juga dapat dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan. Sehingga arah kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien. Berikut beberapa prediksi yang bisa ditawarkan penulis.

Lonjakan Penerbangan Domestic, Hal pertama yang akan terjadi adalah lonjakan penerbangan domestik yang tinggi. Orang-orang yang dulunya terpaksa merefund tiket akan berbondong-bondong membeli tiket pesawat untuk memuaskan hasrat liburan. Apalagi dengan adanya larangan mudik, tentu hal paling pertama yang dilakukan adalah pulang ke kampung halaman. Langkah paling cepat untuk sampai ke kampung halaman dengan transportasi udara. Untuk penerbangan internasional mungkin belum ada pergerakan berarti setelah pandemi. Karena mungkin masih ada pembatasan pergerakan wisatawan asing, baik dari Indonesia maupun negara-negara tetangga

lainnya. Kemungkinan pemerintah masih membatasi pergerakan internasional untuk menghindari gelombang pandemi lanjutan.

Kenaikan Turis Domestik yang Drastic, Setelah pandemi berakhir, tempat wisata satu persatu akan dibuka. Orang-orang akan mencari hiburan apapun yang terdekat dan murah dalam waktu singkat. Salah satunya adalah berwisata domestik. Hal ini juga didukung dengan peningkatan penerbangan domestik dan fenomena mudik.

Banyaknya Promo Tiket, Jasa Tour dan Akomodasi, Cara memulihkan pariwisata dengan cepat dan menggerakkan banyak masa adalah dengan ragam promo di penerbangan, akomodasi dan paket wisata. Setelah pandemi, diprediksi akan bertebaran beragam promo wisata yang pasti akan diburu oleh wisatawan yang sudah haus liburan.

Hotel Penuh dan Munculnya Homestay Dadakan, Bisa dipastikan jika jumlah turis yang liburan meningkat, hotel-hotel mulai dari bintang 1 sampai 5 akan penuh. Tidak tertutup kemungkinan muncul *homestay* dadakan yang digagas oleh warga sekitar tempat wisata. Mereka bisa memanfaatkan usaha *hospitality* menyambut lonjakan wisatawan setelah pandemi. dan ini bisa menjadi salah satu jalan membuka jalur ekonomi warga selain berjualan.

Protokol kesehatan baru, Dari pandemi Corona kita bisa belajar betapa pentingnya hidup bersih dan sehat. Bisa jadi pariwisata belajar banyak dari sini. Mungkin akan ada protokol baru yang fokus pada kebersihan. Seperti adanya hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan penggunaan masker. Juga mungkin di tempat-tempat tertentu akan diterapkan pengecekan suhu tubuh dan adanya ketentuan kesehatan tertentu untuk mencegah tertularnya pengunjung lainnya.

Upaya Pembangunan Pariwisata Dalam Menyongsong New Normal, tentu banyak masukan-masukan yang diberikan kepada pemerintah untuk merancang sector pariwisata dalam tatanan new normal. setidaknya konsep *evidence-based policy* dalam konteks ini harus lebih dikedepankan untuk mendapatkan opsi kebijakan terbaik. Pemerintah akan menyiapkan program promosi pariwisata domestik di masa *new normal*. Program tersebut harus fokus untuk mempromosikan produk-produk lokal dan aman di tengah pandemi virus corona. Persiapan strategi khusus dalam promosi di era *new normal* adalah rencana strategis dan itu harus didukung oleh semua pihak. pemerintah akan fokus meningkatkan wisata domestik hingga ke angka 70%.

Salah satu caranya adalah mendorong wisata *in city*, alias wisata dalam kota. Hal ini akan dimulai sekitar 1-3 bulan ke depan

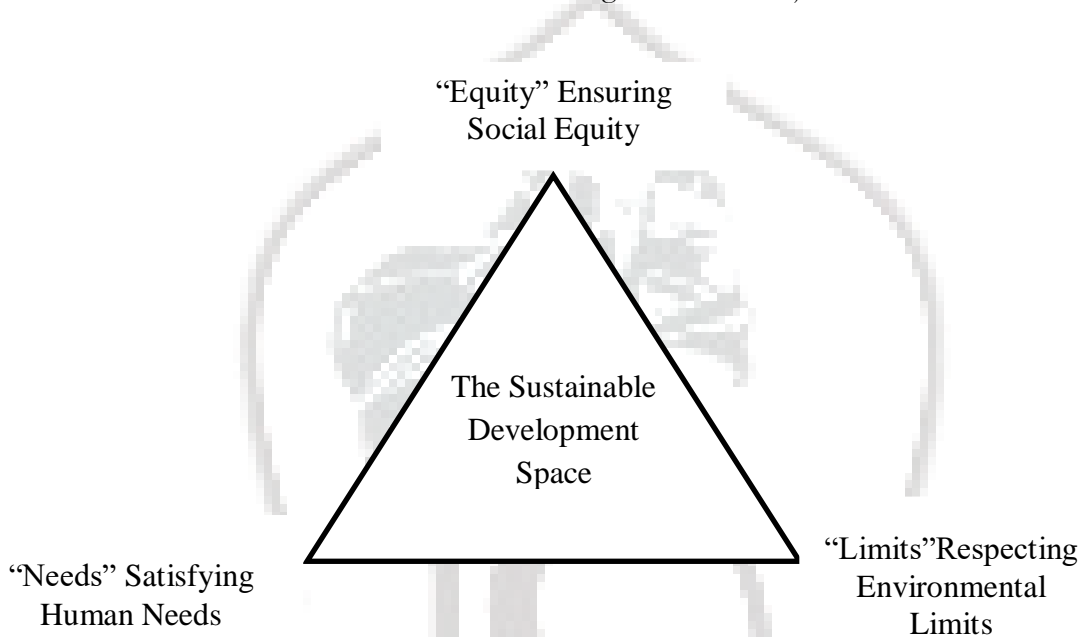
Ada kecenderungan bahwa para wisatawan akan melakukan kunjungan *in city*, di daerah-daerah aja, orang Jakarta ya di Jakarta saja, Bogor ya Bogor saja. Pemerintah mendorong *in city activation* bersama pemerintah daerah dan pariwisata dan asosiasi menawarkan paket yang sifatnya *in city*. *Solo travel tour*, *wellness tour*, *virtual tour*, dan *staycation* ialah produk wisata yang dapat disebut sebagai contoh dari alternatif liburan yang diprediksi bakal laku dijual di era *new normal*. Kemudian nantinya ada promosi yang dilakukan di daerah-daerah untuk membuat wisatawan plesiran di daerahnya saja. Misalnya ada diskon hotel untuk masyarakat di suatu daerah dengan menunjukkan KTP daerah itu sendiri. Salah satu tujuannya untuk membuka roda perekonomian daerah. Selain itu bisa mencegah masyarakat ke luar masuk suatu daerah untuk meminimalisir penyebaran virus Corona. Hal yang penting pada saat ini adalah *social safety net*, kesadaran pengelola dan pengunjung dalam berinteraksi. kesehatan dan kebersihan menjadi prioritas. Kebutuhan dasar pariwisata saat ini adalah *safety*, *security* dan tambah lagi *healthy*.

Upaya lain dalam konsep pariwisata di era *new normal* ini adalah konsep yang berbasis pada kerelawanan dan solidaritas. Konsep ini disebut *Voluntourism*, yang bermakna melakukan perjalanan wisata sambil menjadi sukarelawan. *Voluntourism* bisa menjadi solusi tepat untuk pemulihan sektor pariwisata di masa *new normal*. Pandemi Covid-19 yang melahirkan krisis di banyak bidang kehidupan memberikan peluang bagi masyarakat sipil dan pemerintah untuk memperkokoh solidaritas sebagai kenormalan baru.

Tingkat kerelawanan tinggi yang dimiliki penduduk Indonesia merupakan bekal strategis untuk mewujudkan kenormalan baru. Kepedulian warga dalam program *voluntourism* yang dijalankan juga sangat penting demi menjaga solidaritas sosial dan modal sosial tetap ada dan dimiliki bersama. Dan yang terakhir adalah bagaimana kepedulian terhadap aktivitas leisure dan peduli terhadap alam, budaya, lingkungan, dan sesama. Selain itu juga menjaga keamanan, keselamatan dan mencegah penyebaran covid-19, pemerintah juga harus menuangkan dalam tatanan era *new normal* terkait konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Sebab, paham *sustainable development* menekankan pada kesadaran dalam penggunaan sumber daya yang digunakan untuk proses perumahan, industri transportasi atau

rekreasi (Trindade, 2017: 1). Pembangunan berkelanjutan juga menerangkan adanya keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Konsep *sustainable development* sering mendengungkan bahwa harus mencapai titik keseimbangan antara kelestarian lingkungan, ekonomi dan sosial (Mensah and Sandra, 2019:15).

Gambar 1. Pilar Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Holden et al, 2017: 215.

Pembangunan pariwisata di era new normal tidak terlepas dari tiga elemen tersebut. oleh sebab itu pemerintah harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam membuka atau menunda pembukaan sector pariwisata. Standar baru, kebiasaan baru, dan kultur baru di sektor pariwisata harus dikembangkan sehingga produk baru pariwisata yang tepat dan memuaskan pun dapat dikreasikan dan disodorkan kepada para wisatawan era *new normal*. Disini peran pemerintah dalam mengambil keputusan sangat sensitif. Apalagi pemerintah harus melihatan dependensi masyarakat terhadap sektor pariwisata. tidak sedikit masyarakat merasa kesulitan ketika objek wisata diberhentikan. Ini menjadi pertimbangan yang

sulit bagi pemerintah. Oleh karena, masyarakat dan lainnya harus saling membantu dan bergotong royong dalam menyelesaikan persoalan publik. koordinasi, kepatuhan dan kerjasama yang baik yang bisa menyelesaikan pandemic ini dan menyongsong tatanan *new normal* yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, Pembangunan sector pariwisata dalam tatanan *new normal* adalah salah satu sektor tersulit dalam mendesain pelaksanaannya. Karena sektor pariwisata adalah sektor terbesar yang berpotensi penyebaran covid-19 di Indonesia. *Kedua*, Berdasarkan tiga elemen dari teori kuncoro, yaitu *Sustenance, Self Esteem dan Freedom from servitude*. Maka tiga elemen tersebut dapat terimplementasi dengan baik dengan syarat harus mematuhi protocol Kesehatan dalam tatanan *new normal*. tiga elemen ini juga menjadi pertimbangan besar bagi pemerintah untuk membuka atau menunda operasi sector pariwisata. Karena pengaruhnya terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan sangat besar. *Ketiga*, Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi dan ramalan yang sudah dianalisis, maka upaya yang bisa dijalankan dalam sector pariwisata di era *new normal* adalah (1) wisata *in city*, (2) promosi wisata daerah, (3) bersifat kerelawanan dan solidaritas dan (4) mengambil kebijakan dengan basis *sustainable development*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, Krishna dan Wayan Sudarmayasa. 2017. Pembangunan Pariwisata Daerah Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia di Gorontalo. Jurnal JUMPA Volume 4 Nomor 1.
- Ariyanti, I.H. (2015). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana (Studi Deskriptif tentang Penanggulangan Bencana Letusan Gunung Kelud di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 3, No. 2 (23-32). UNAIR.
- Budiman, Arif. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chen et al, 2020. *Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records*. Articles. Published online February 12. 2020.

- Creswell, John, 2009. Research Design. Terjemahan Oleh Achmad Fawaid. 2010. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Eshlikii, S.A. & Kaboud, M., 2012. Community Perception of Tourism Impacts and Their Participation in Tourism Planning: A Case Study of Ramsar, Iran. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 36, pp.333-341.
- Holden et al. 2017. The Imperatives of Sustainable Development. *Sust. Dev.* 25.
- Howlett, Michael & Ramesh. M. (1960). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. First edition. Oxford University Press. New York.
- Hsieh, H.-J. & Kung, S.-F., 2013. The Linkage Analysis of Environmental Impact of Tourism Industry. *Procedia Environmental Sciences*, 17, pp.658-665.
- James. E Anderson. (1975). *Public Policy-Making*. Praeger Publishers. New York.
- Kimura Fukunari et al. 2020. Pandemic (COVID-19) Policy, Regional Cooperation, and the Emerging Global Production Network. ERIA Discussion Paper Series. No. 328.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*, UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kurki et al. 2016. Assessing Regional Cooperation in Water Services: Finnish Lessons Compared with International Findings. *Public Works Management & Policy* 1 –22.
- Kurniawan, Wawan. 2015. Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal* (4).
- Mensah, Justic and Sandra Ricart Casadevall. 2019. *Sustainable Development: Meaning, History, Principles, Pillars, and Implications for Human Action: Literature Review*. *Cogent Social Sciences*. 5: 1653531.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI Press.
- Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Riant, Nugroho. 2018. *Public Policy*. 6th ed. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sondang, P. Siagian, 1994, *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta.

SUMBER JURNAL

- Tikson, T. Deddy. 2005. Administrasi Pembangunan. Makassar: Gemilang Persada.
- Trindade. 2017. *Sustainable Development of Smart Cities: A Systematic Review of the Literature*. Journal of Open Innovation. Technology, Market, And Complexity. 3:11.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus). Jakarta. PT. BUKU SERU.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
- Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).